

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Berpendapat tentang hukum berarti tak bisa lepas dengan penegakannya. Seperti halnya adagium yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus yang berarti *meskipun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan*. Maknanya adalah sesulit apapun kondisinya, penegakan hukum harus dilakukan dengan sebenar-benarnya.

Penegak hukum selaku pilar dalam penegakan hukum agar berlakunya hukum dapat mencapai 3 tujuan yakni kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Mengutip pendapat menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak

¹ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: UI Press. 1983. hal. 35

hukum.² Itu berarti untuk memberikan sebuah kemantapan hukum maka harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang tepat pula.

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi diartikan: a) sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb), dan b) anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan.”. Sadjijono mengemukakan bahwa polisi adalah “organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara” (Sadjijono, 2008).

Istilah kepolisian sebagai organ dan juga sebagai fungsi. Polisi sebagai organ, yakni “suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang yakni fungsi preventif dan fungsi represif”. Salah satu wewenang yang diberikan oleh Kepolisian berdasarkan Undangundang yaitu mengenai pengamanan lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan

² M.Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian).jakarta:Pt Pradnya Paramita.1991. hlm. 42

hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah: 1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan 2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik 3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan 4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya

Dalam hal berlalu lintas manusia adalah subjek utamanya. Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama dalam berlalu lintas. Dalam penampilannya seorang pengemudi dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan kendaraan sebagai alat angkut mempunyai bentuk, ukuran dan kemampuan yang bermacam-macam sesuai kebutuhan. Jaringan jalan sebagai tempat penampungan lalu lintas mempunyai fungsi dan kondisi yang berbeda-beda mulai dari lebar lajur, jumlah lajur, daya dukung dan lain-lain. Agar lalu lintas dapat berjalan dengan lancar, teratur, tertib dan selamat, maka perlu diatur dan ditata dengan perangkat peraturan yang cocok dan dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya.³

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, hal tersebut terjadi karena adanya kealpaan atau ketidakpatuhan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya maupun dalam memperhatikan rambu dan juga marka jalan. Kelalaian pengemudi tersebut seringkali menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan, mengutip pernyataan Wirjono Projodikoro

Kesalahan pengemudi bermotor sering dapat disimpulkan dengan memperlakukan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau mengendarai motor tidak di jalur kiri, atau pada suatu

³ Hasan Basri, Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan, Jakarta, Warta Penelitian No 4,5,6/Th V/Juli, Agustus, September Tahun 1993, hal. 12

persimpangan tidak memberikan prioritas kepada 4 kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri , atau menjalankan motor terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.⁴

Doktrin tersebut mengindikasikan, terjadinya kecelakaan merupakan faktor kesalahan manusia yakni yang terletak pada tidak adanya rasa hati-hati dan lalai dalam mengemudikan kendaraannya. Definisi mengemudi dalam undang-undang tidak hanya ketika kendaraan berjalan namun jug mengenai tata cara parkir dan berhenti.

Dalam konteks penyidikan dengan restorative justice polisi adalah adalah gerbang (gatekeepers) dari sistem peradilan pidana. Seperti dikatakan Donald Black, perannya sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana, menempatkan polisi berhubungan dengan sebagian besar tindak pidana umum atau biasa (ordinary or common crime). Sebagian besar polisi bekerja reaktif daripada proaktif, dengan sangat bergantung pada warga masyarakat untuk mengadu atau melapor atas dugaan terjadinya tindak pidana. Perubahan model penyidikan dari yang bersifat sematamata punitif (menghukum) ke arah restoratif (pemulihan pelaku maupun korban) merupakan perubahan lebih dari sekedar teknik, namun kultur penyidikan. Oleh karena itu, membutuhkan proses panjang untuk adaptasi, yang tampaknya tidak dapat ditunda-tunda. Sebagai contoh, skema melibatkan korban (victim's participation scheme) dalam proses penyelidikan atau

⁴ Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama. Hal 112

penyidikan bukan hal mudah karena menuntut perubahan dari pola-pola yang biasa “tertutup” menjadi lebih “terbuka”.

Masalah-masalah Kelalaian dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada ketentuan Pasal 310 yaitu :

- “(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

(5) Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas (Lakalantas) terjadi juga karena kurangnya kesadaran masyarakat, terutama pengemudi kendaraan bermotor dalam mematuhi aturan. Dengan berbagai faktor yang salah satunya tidak faham mengenai tata cara berkendara dan parkir kendaraan. Mengenai kaidah parkir tertera didalam pasal 120 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ⁵. Yang berisi “Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.”

Kaidah-kaidah berkendara di jelaskan pada bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu mengulas tentang ketertiban dan keamanan, UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106, menyebutkan bahwa: UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ketentuan Pasal 105, Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib: a. Berperilaku tertib; dan/atau b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

⁵ pasal 120 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ

UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada

Ketentuan Pasal 106, berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan.
4. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. Rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. Gerakan Lalu Lintas;
 - e. Berhenti dan Parkir;
 - f. Peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. Kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. Tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Dengan adanya pasal-pasal yang secara khusus mengatur perihal serba-serbi masalah lalu lintas tersebut mestinya menjadikan penyidik lebih mudah dalam melakukan penyidikan. Sehingga yang tercantum dalam BAP tidak berbeda dengan yang terungkap dalam persidangan, ini jelas akan sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum. Apabila hasil penyidikan menggunakan pasal yang kurang tepat. Penulis menemui keganjalan ketika membaca salah satu hasil resume kepolisian, sehingga penulis jadikan bahan hukum dimana masih digunakannya pasal 359 KUHP dalam menyelesaikan perkara kelalaian pengemudi sehingga menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Penulis akan mengulas fenomena tersebut dalam

⁶ Undang-Undang nomor 22 Tahun 2011 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

bentuk skripsi karena pada saat aparat melaksanakan penegakan hukum atau bertugas menarik permasalahan yang perlu dikemukakan yakni; apa pertimbangan kepolisian dalam memproses perkara kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan matinya seseorang karena kealpaan. **“ANALISIS DOKUMEN RESUME HASIL PENYIDIKAN SATLANTAS POLRES NGANJUK DALAM PERKARA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DI JALAN RAYA”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya (pada perkara laka lantas pada Dokumen Resume Nomor Pol : K/LP 15.21/399/VII/2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian perkara kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberi gambaran bagi penyidik mengenai penyelesaian perkara kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya.
2. Sebagai dasar reviewing Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

terhadap kondisi pengendara transportasi di jalan raya yang berpengaruh terhadap keselamatan pengendara transportasi lain.

3. Sebagai bahan kajian bagi penegak hukum dan masyarakat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan sehingga dapat membahayakan nyawa orang lain.. Serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Masyarakat, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di jalan raya.
3. Bagi Universitas dan fakultas, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater dan sebagai inventarisasi perpustakaan sebagai bahan bacaan atau bahan kajian pustaka.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum seperti ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan data valid serta mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Maka penulis memerlukan suatu metode penulisan hukum yang meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah⁷. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di Indonesia.⁸

2. Jenis Bahan

1. Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :
 - a. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - b. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
 - c. KUHP dan KUHPA
 - d. Hasil Resume Kepolisian (Nomor Pol : K/LP 15.21/399//VII/2018)

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hal 24.

⁸ Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) hal. 72

2. Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: teori-teori para ahli, hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum.
3. Metode Analisa Data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian analisa data dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi mengenai teori-teori terkait tinjauan yuridis dan normative sebagai permasalahan yang diambil oleh penulis dengan Bahasa antara lain teori reflektif norma, teori hierarki perundang-undangan, teori asas hukum pidana, dasar hukum UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 359 KUHP

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini berisi tentang hasil penelitian dari tema yang telah dipilih oleh penulis, hasil penelitian ini telah dianalisa dan dikaji berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam bab II

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya